

Judul : Sekolah rakyat disabilitas, kebijakan inklusi butuh persiapan
Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sekolah Rakyat Disabilitas

Kebijakan Inklusi Butuh Persiapan

PERKUMPULAN Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mengusulkan kuota minimal lima persen bagi anak disabilitas di Sekolah Rakyat. Kebijakan ini diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih setara, terutama di daerah terpencil yang minim fasilitas khusus.

Menanggapi itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengingatkan, angka kuota sebesar apa pun tidak akan efektif tanpa dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya memadai.

"Inklusi sejati bukan hanya soal membuka pintu, tapi menciptakan ruang belajar yang ramah, adaptif, dan mendukung perkembangan setiap anak," ujarnya, Senin (11/8/2025).

Netty menilai, Sekolah Rakyat di pinggiran bisa menjadi harapan baru bagi anak disabilitas. Namun tanpa instrumen pendukung, kebijakan ini justru berisiko menjadi jebakan.

Dia menegaskan perlunya lima komponen penting: guru dan pendamping kompeten, fasilitas pembelajaran adaptif,

infrastruktur fisik yang aksesibel, layanan kesehatan dan psikososial, serta kurikulum fleksibel.

"Seorang anak tuli butuh guru yang mampu berbahasa isyarat. Sedangkan anak tunanetra butuh literatur Braille. Ini bukan soal belas kasihan,

tapi hak atas pendidikan," kata politisi PKS itu.

Dia juga mengingatkan potensi trauma baru jika kebijakan inklusi diterapkan tanpa persiapan. Guru berisiko mengalami stres, burnout, bahkan frustrasi jika belum terlatih menghadapi kelas beragam. Komunikasi yang buruk dapat memicu frustrasi siswa hingga kekerasan.

"Karena itu, perlu pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk guru," tambahnya.

Netty menegaskan, Sekolah Rakyat inklusif memerlukan dukungan anggaran memadai dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.

"Pendidikan inklusif adalah cermin negara yang adil dan beradab. Tapi itu butuh niat politik yang sungguh-sungguh, bukan sekadar jargon," tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Penasihat Portadin Siswandi Abdul Rachim mengatakan, kuota lima persen akan memastikan anak disabilitas mendapat layanan pendidikan setara di lingkungan sosialnya.

Menurutnya, pendidikan inklusif seperti Sekolah Rakyat menjadi solusi strategis mengingat jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) masih terbatas. Data Portadin mencatat, hanya ada 2.396 SLB yang melayani kebutuhan pendidikan di 7.287 kecamatan se-Indonesia. ■ PYB